

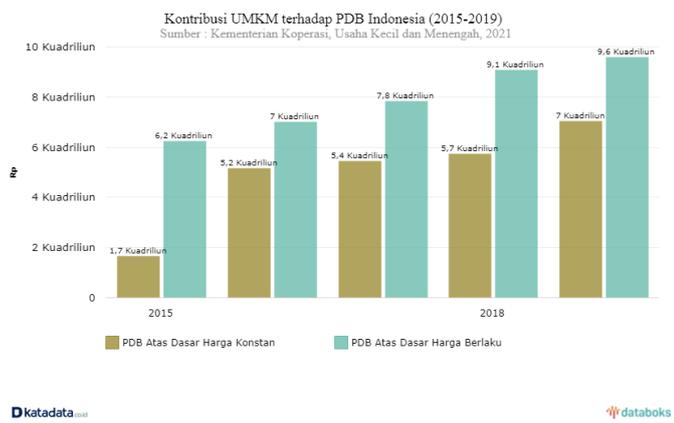
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Di era modern ini, sebagian besar masyarakat memulai wirausaha dengan membangun usaha mikro kecil menengah (UMKM). Di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting bagi laju perekonomian yang mana sebagai salah satu cara untuk percepatan pembangunan daerah. Merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, usaha mikro kecil dan menengah adalah sektor yang mengambil peran cukup besar dalam menyediakan lapangan kerja. Selain itu, UMKM juga memiliki kemampuan bertahan yang cukup tinggi bagi keadaan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) setelah kejadian krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998, banyaknya jumlah UMKM tidak mengalami penurunan malah semakin mengalami peningkatan hingga saat ini. Kementerian Koperasi dan UKM RI mengatakan apabila dilihat dari jumlah unitnya, UMKM mempunyai pangsa pasar sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari semua jumlah total usaha yang ada di Indonesia, akan tetapi usaha besar hanya mampu berkontribusi sebanyak 0,01% atau sekitar 5.400 unit. Sedangkan usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja sekitar 107,2 juta atau (89,2%), dan usaha kecil 5,7 juta atau 4,74%, serta untuk usaha menengah sekitar 3,73 atau 3,11% sedangkan usaha besar hanya mampu menyerap sekitar 3,58 juta jiwa yang berarti bahwa secara keseluruhan UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, dibandingkan dengan usaha besar yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 3% dari total keseluruhan. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi

mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor lainnya. UMKM juga memiliki peran yang besar terhadap daya serap tenaga kerja serta berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Dari sudut pandang Produk Domestik Bruto (PDB), sumbangan UMKM juga menjanjikan.



Gambar 1.1  
Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia Tahun 2015 - 2019

Sumber: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2021)

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dapat dilihat bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp 9.580,8 triliun. Kontribusi ini naik 5,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9.062,6 triliun. Besarnya kontribusi UMKM ini dikarenakan UMKM merupakan mayoritas penyumbang dari unit usaha di Indonesia. Sebanyak 64,2 juta atau 99,99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Bila dibandingkan dengan Usaha Besar (UB), hanya sebesar 5,5 ribu atau 0,01% dari total unit usaha di Indonesia.

Bali merupakan wilayah di Indonesia yang pariwisatanya telah dikenal oleh kalangan masyarakat di seluruh dunia. Selain pariwisata, kentalnya adat istiadat serta besarnya potensi alam yang dimiliki pulau Bali menjadikan masyarakat Bali melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan mendirikan UMKM. UMKM di Bali merupakan industri yang masih tetap eksis karena kegiatan bidang ini tidak terpengaruh dengan adanya krisis. Bertambahnya unit-unit usaha kecil dan menengah tidak terlepas dari peran kewirausahaan pelaku UMKM. Pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa UMKM adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi, pertumbuhan jumlah wirausahawan yang kreatif dan inovatif dan penciptaan tenaga kerja terampil dan fleksibel dalam proses produksi untuk menghadapi perubahan permintaan pasar yang cepat (Sari, 2014, hal. 2). Berikut perkembangan jumlah data UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2018-2022.

Tabel 1.1  
Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022

No	Kabupaten /Kota	Tahun					Pertumbuhan 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jembrana	27.654	24.346	46.277	66.537	67.183	53%
2	Tabanan	41.459	42.744	43.715	47.160	47.957	18%
3	Badung	17.754	19.688	19.261	22.647	40.909	13%
4	Gianyar	75.412	75.482	75.542	75.620	75.666	-17%
5	Klungkung	11.761	14.584	35.792	36.072	35.792	27%
6	Bangli	43.948	44.068	44.068	44.123	44.175	0,5%

No	Kabupaten /Kota	Tahun					Pertumbuhan 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
7	Karangasem	39.551	40.468	57.456	40.614	50.717	4%
8	Buleleng	34.552	35.555	54.489	57.216	66.368	81%
9	Denpasar	31.826	32.026	32.224	32.226	29749	4%
		325.971	327.353	412.265	440.609	439.382	

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali (Data diolah penulis, 2023)

Berdasarkan pada tabel 1.4 diatas, UMKM menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali telah mencatat sejak tahun 2018-2022 jumlah UMKM mengalami peningkatan lebih dari 260.000 unit. Hal ini telah membuktikan bahwa keberadaan UMKM sangat berpengaruh besar pada roda perekonomian nasional. Melihat data yang disajikan oleh Dinas Koperasi dan UKM dapat diinterpretasikan bahwa secara umum UMKM dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian Provinsi Bali. Berdasarkan tersebut juga dapat dicermati bahwa pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng menempati posisi pertama dengan hasil 81%. Hal ini berarti tingkat pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng paling besar jumlahnya dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali. Selain itu juga didukung oleh bukti bahwa Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara kabupaten lainnya, yaitu mencapai 827.642 jiwa ([www.katadata.com](http://www.katadata.com)) dan memiliki wilayah terluas di Provinsi Bali sebesar 1.322,75 km<sup>2</sup> (Bulelengkab.go.id, 2019). Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa adanya

indikasi peningkatan serta tingginya jumlah UMKM yang mengalami perkembangan usaha. Berikut merupakan data UMKM di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.2  
Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022

No	Klasifikasi Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Usaha Mikro	25.202	26.048	44.670	47.311	55.173
2.	Usaha Kecil	9.140	9.294	9.576	9.654	10.827
3.	Usaha Menengah	193	196	226	234	351
	<b>Total</b>	<b>34.535</b>	<b>35.538</b>	<b>54.472</b>	<b>57.199</b>	<b>66.351</b>

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (2023)

Berdasarkan data saat observasi di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (2020), bahwa UMKM mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, dimana dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat sebesar 1003 unit dan mengalami lonjakan pada tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 18.934 unit. Berikut data mengenai jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng per masing-masing Kecamatan periode 2018-2022.

Tabel 1.3  
Data Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Gerokgak	4.619	4.710	4.994	5.286	5.466
2.	Seririt	4.190	4.461	4.502	4.502	4.578
3.	Busungbiu	3.687	3.755	3.810	3.853	3.938
4.	Banjar	3.490	3.578	3.612	3.649	3.739
5.	Sukasada	2.941	3.014	3.073	3.110	3.210
6.	Buleleng	6.600	6.836	6.951	7.020	7.397

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
7.	Sawan	3.128	3.158	3.241	3.268	3.378
8.	Kubutambahan	2.765	2.823	2.847	2.866	2.991
9.	Tejakula	3.132	3.220	3.320	3.420	3.550

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Buleleng (2023)

Data di atas memaparkan jumlah UMKM yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2022 Kecamatan Buleleng merupakan kecamatan yang memiliki jumlah UMKM terbesar di Kabupaten Buleleng dengan jumlah UMKM sebesar 7.397 unit dan penyebaran terkecil terletak di Kecamatan Kubutambahan. Tingginya angka perkembangan UMKM di Kecamatan Buleleng dikarenakan Kecamatan Buleleng merupakan pusat dari Kabupaten Buleleng (Uma et al., 2017). Hal ini berarti segala kegiatan maupun aktivitas usaha dengan berbagai macam bidang berkembang lebih banyak di Kecamatan Buleleng.

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu terdapat permasalahan-permasalahan di UMKM. Berikut ini gambar permasalahan yang dihadapi oleh pemilik UMKM.



Gambar 1.2  
Permasalahan UMKM

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023

Seperti yang terlihat pada data di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, masalah secara umumnya yaitu kualitas sumber daya manusia UMKM yang masih rendah serta minimnya pengetahuan, keinginan untuk belajar dan kompetensi kewirausahaan mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha, tenaga kerja dan kurang maksimalnya penerapan SAK EMKM pada setiap UMKM. Laman web [Kontan.co.id](http://Kontan.co.id)-Jakarta menyatakan pengembangan keterampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pemilik UMKM harus dilakukan. Pasalnya, UMKM mempresentasikan 98,8 % unit usaha di Indonesia menurun menurut catatan Dirjen Pajak. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Rudy Salahuddin mengatakan, meski UMKM berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi UMKM masih terkendala, kendalanya masih rendah kualitas SDM dari pemilik UMKM, baik itu dalam edukasi, pandangan maupun teknologi.

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah melalui DSAK IAI menerbitkan standar terkini terkait penyusunan laporan keuangan bagi UMKM yakni Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dengan harapan dapat mempermudah penggiat usaha dalam merencanakan laporan finansial sehingga dapat mengajukan kredit modal dari bank. Standar ini merupakan penyusunan ulang dari Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang selama ini dipandang masih merepotkan dalam perencanaan ringkasan finansial bagi penggiat UMKM. Mengenai sebagian rincian norma dalam SAK EMKM, bagian-bagian ringkasan anggaran hanya terdiri dari catatan keuangan, laba rugi dan catatan atas

laporan anggaran, rincian finansial dari pengungkapan moneter berbasis kas hingga hingga berbasis akrual, laporan komparatif diperkenalkan eksklusif dengan satu periode terakhir, serta sebagainya.

Dengan meningkatnya pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng, maka diharapkan penerapan SAK EMKM ini semakin diperhatikan oleh pelaku UMKM agar mudah untuk mengakses permodalan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha. Akan tetapi, sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng masih melakukan pencatatan keuangan yang sederhana yaitu pemasukan dan pengeluaran kas saja. Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng, Ibu Eka Pradya berkata hampir 80% pelaku UMKM masih membuat pencatatan yang sederhana yaitu pemasukan dan pengeluaran kas saja dan kebanyakan para pelaku UMKM berusia 35 tahun. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman akuntansi, kurangnya pemahaman teknologi informasi, dan membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam penyusunan laporan sesuai standar yang diberlakukan. Beberapa pelaku UMKM tersebut adalah Adi Sika Abadi (Toko Bangunan) dan Glori Beauty Studio yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas saja dan Glori Beauty Studio. Laporan keuangan berlandaskan SAK EMKM ini memiliki komponen yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usahannya mulai dari produksi, keuangan, dan sebagainya. Berdasarkan observasi awal, sebagian besar pelaku usaha hanya menggunakan modal pribadi walaupun telah banyak program dari pemerintah untuk pengembangan UMKM. Dukungan pemerintah dalam pengembangan UMKM salahnya satunya dalam bidang

permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat yang dapat diakses di berbagai bank seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank lainnya (Suastini et al., 2018). Dalam hal pengembangan usaha juga tidak terlepas dari laporan keuangan yang akan menyediakan data terkait kinerja, arus kas usaha, dan informasi keuangan lainnya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Namun, sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Buleleng masih banyak yang belum membuat pembukuan sesuai pedoman karena kurang memahami akan pentingnya akuntansi terhadap pertumbuhan usaha.

Berdasarkan observasi awal, permasalahan-permasalahan yang menimpa pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng dalam penerapan SAK EMKM yaitu rendahnya pemahaman akuntansi karena kebanyakan pelaku UMKM mempunyai pendidikan yang dibawah. Kemudian, persepsi pelaku UMKM masih sangat rendah dalam melaksanakan praktik keuangan adanya persepsi bahwa pembukuan tidak penting dalam usahanya, persepsi bahwa akuntansi terlalu rumit untuk dilakukan hingga tidak ada pemisahan dana pribadi dan dana yang digunakan dalam proses bisnis. Permasalahan yang selanjutnya, kurangnya pemahaman teknologi informasi dalam menyusun laporan keuangan berlandaskan SAK EMKM dari pihak-pihak bersangkutan sehingga pelaku UMKM masih kesulitan dalam menerapkan SAK EMKM dalam membuat laporan keuangan. Menurut Dewi & Sari (2019) laporan keuangan dipergunakan dalam menganalisa kinerja finansial dalam upaya pembuatan pilihan keuangan dan sebagai tanggung jawab penggunaan sumber daya oleh manajemen. Oleh karena itu, pengaplikasian SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan menjadi perhatian penting bagi pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng.

Salah satu aspek yang mendampaki pengaplikasian SAK EMKM di UMKM ialah pemahaman akuntansi. Pemahaman akuntansi merupakan suatu proses memahami informasi pembukuan yang mengingat pengungkapan akuntansi dan moneter sesuai standar akuntansi yang ditetapkan. Menurut Mutiari & Yudiantara (2021) pelaku UMKM yang mempunyai pengetahuan cukup baik dalam memahami akuntansi akan dapat menghasilkan laporan finansial sesuai standar. Pengertian akuntansi bisa didukung melalui jenjang pendidikan, pengalaman, dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan usaha. Teknik yang tepat dalam mengawasi dana usaha untuk UMKM ialah dengan menerapkan pembukuan yang bagus (Widyawati, 2020). Dalam dunia usaha, laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan guna analisis kinerja, maka dari itu diperlukan pemahaman pembukuan yang baik agar memiliki pilihan untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, khususnya SAK EMKM. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang bergantung pada pemahaman bahwa orang akan bertindak sesuai dengan alasan bahwa orang adalah makhluk yang waras yang dapat memanfaatkan data dengan sengaja untuk merenungkan efek dari suatu kegiatan dengan asumsi mereka bertindak dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Dalam TPB terdapat variabel norma subjektif yang menjelaskan keyakinan dari seseorang mengenai reaksi terhadap tindakan yang dilakukan. Apabila pelaku UMKM yakin dengan pengertian akuntansi yang dimiliki akan menyuguhkan reaksi yang positif terhadap usahanya maka pelaku UMKM akan melakukan tindakan tersebut yaitu menerapkan SAK EMKM sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bidang akuntansi yang digunakan untuk analisis kinerja usaha. Riset Vera Periska (2024) menemukan pemahaman akuntansi

berdampak positif serta signifikan pada penyusunan laporan keuangan UMKM berlandaskan SAK EMKM. Riset Intania Pramaiswari (2019) menemukan pemahaman akuntansi tidak berdampak pada implementasi SAK EMKM pada BNI cabang Situbondo

Faktor selanjutnya terkait dengan penerapan SAK EMKM pada UMKM yaitu persepsi pelaku UMKM. Persepsi merupakan bagaimana seseorang mempersepsikan, menggambarkan, atau menafsirkan sesuatu tempat/kejadian dan manusia. Orang-orang bertindak berdasarkan persepsi mereka. Persepsi oleh pelaku UMKM ialah proses dimana seseorang belajar melalui prasangka terhadap informasi pendengaran dan visual. Persepsi pelaku UMKM bahwa penyusunan laporan keuangan merepotkan dan menambah biaya. Pada umumnya tanpa pengelolaan keuangan yang baik sulit untuk menetapkan pencapaian usaha. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan keahlian yang memadai tentang pelaporan keuangan untuk dapat menyusun pelaporan keuangan, menentukan biaya produksi, dan menetapkan harga jual.

Riset dari Sinta (2023) menyatakan bahwa penerapan SAK EMKM di Kabupaten Sragen dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh persepsi pelaku UMKM. Ini berarti penerapan SAK EMKM akan meluas seiring dengan meningkatnya persepsi pelaku UMKM dan riset dari Atika (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM.

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangan usahanya yaitu minimnya penguasaan teknologi informasi. Pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Buleleng mengalami

kesulitan dalam memanfaatkan teknologi informasi ketika ingin meluaskan usahanya untuk dapat bersaing di dunia usaha. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi saat ini. Teknologi informasi sangat penting diterapkan pada kegiatan usaha, dimana akan mempermudah dalam pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM, dan dapat meminimalisir kesalahan pembukuan akuntansi (Kusumasari, 2021). Rendahnya kualitas SDM yang menyebabkan para pelaku usaha belum maksimal dalam menjalankan aktivitas usaha untuk membuat laporan keuangan usaha sehingga dapat mempengaruhi kapasitas usaha. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan pemilik usaha yang masih rendah.

Menurut (Lathifah, 2018) menyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Paham dengan teknologi informasi saat ini, maka penerapan standar akuntansi keuangan akan terealisasi. Semakin tinggi tingkat pemahaman teknologi informasi maka semakin luas pandangan para pelaku UMKM terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi di dalam kehidupan bisnisnya. Paham adanya teknologi informasi saat ini dapat mendorong percepatan penyediaan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM (Teguh, 2022). Pentingnya pemahaman teknologi Informasi bertujuan untuk mengadopsi dan memanfaatkan suatu informasi akuntansi, sebab informasi akuntansi digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha (Nurhidayanti, 2020). Hal ini menandakan bahwa pemahaman teknologi informasi penting bagi UMKM dalam membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Setiap pelaku usaha dituntut untuk

memanfaatkan teknologi informasi agar mudah dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal (Silvia & Azmi, 2019).

Penelitian yang dilakukan (Kusumasari, 2021) yang menyatakan bahwa secara parsial pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Alverina, 2024) yang menyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saragih, 2023) yang menyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM. Hal ini menunjukkan adanya *inconsistent* hasil penelitian mengenai penerapan SAK EMKM. Adanya *inconsistens* mengenai pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM menjadi dasar alasan mengapa peneliti ingin meneliti kembali pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM. Semakin paham terhadap teknologi informasi maka akan semakin luas pandangan terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi di dalam kehidupan bisnis dan akan dapat mendorong percepatan penyedia informasi akuntansi yaitu berupa laporan keuangan bagi UMKM. Oleh sebab itu, pemahaman teknologi informasi sangat diperlukan agar pelaku UMKM dapat membuat dan menerapkan sesuai SAK EMKM. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pemahaman teknologi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vera Periska pada tahun 2024. Research gap dari penelitian ini terletak pada kebaruan yang berbeda, yaitu penggunaan variabel teknologi informasi dan persepsi pelaku UMKM sebagai elemen yang penting dalam analisisnya. Selain itu, penelitian ini

memiliki ciri khas tersendiri dalam pemilihan subjek penelitian, yaitu penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Dengan menggabungkan variabel teknologi informasi, pemahaman akuntansi dan persepsi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan terkait dengan faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang cara meningkatkan kualitas laporan keuangan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan untuk UMKM dan mendorong pertumbuhan sumber daya manusia pada UMKM di Kecamatan Buleleng.

Mengingat dasar pemeriksaan, fitur dan masalah, eksplorasi ini tertarik untuk menggunakan judul **“Pengaruh Teknologi Informasi, Pemahaman Akuntansi dan Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Penerapan SAK-EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM di Kecamatan Buleleng”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng yaitu:

- 1) Pelaku UMKM mayoritas belum menerapkan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan, hanya saja membuat pencatatan keuangan sederhana.
- 2) Kurangnya pemahaman akuntansi pelaku UMKM karena latar belakang pendidikan yang rendah, pengetahuan yang terbatas, dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan yang kurang efektif.

- 3) Persepsi pelaku UMKM masih sangat rendah dalam melaksanakan praktik keuangan adanya persepsi bahwa pembukuan tidak penting dalam usahanya, persepsi bahwa akuntansi terlalu rumit untuk dilakukan hingga tidak ada pemisahan dana pribadi dan dana yang digunakan dalam proses bisnis.
- 4) Kurangnya pemahaman pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pencatatan laporan keuangan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis hanya akan memfokuskan pada permasalahan berkaitan dengan variabel teknologi informasi, pemahaman akuntansi dan persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng?
- 2) Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng?
- 3) Apakah persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng?

- 4) Apakah teknologi informasi, pemahaman akuntansi dan persepsi pelaku UMKM berpengaruh secara simultan terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menguji beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi, pemahaman akuntansi dan persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat teoritis:
  - a) Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pemahaman penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Serta dampaknya bagi masyarakat yaitu

pelaku UMKM dalam meningkatkan pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan yang tepat dan sesuai dengan SAK EMKM.

- b) Bagi Mahasiswa, melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis. Serta sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.
- c) Bagi akademisi, konsekuensi dari riset ini diharapkan dapat membangun informasi dan pengetahuan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan SAK EMKM terhadap UMKM. Kemudian, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis:

- a) Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi para pelaku usaha dan membantu pelaku usaha untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.
- b) Bagi DSAK IAI/ Lembaga Keuangan, sebagai acuan bagi DSAK IAI untuk melihat seberapa paham UMKM atas penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM. DSAK IAI dapat menilai langkah untuk mengawasi dan mengevaluasi dari SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM.